

ABSTRAK

Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum merupakan kegiatan untuk memperoleh tanah dengan cara memberikan ganti kerugian yang layak kepada pihak yang melepaskan tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah. Tanah untuk kepentingan umum digunakan untuk pembangunan bandar udara, pelabuhan, jalan umum, jalan tol, jalur kereta api, terminal, dan fasilitas umum. Kegiatan ini sering menimbulkan masalah di masyarakat, dimana sengketa pengadaan tanah untuk kepentingan umum seringkali diakibatkan oleh ketidaksepakatan atas penetapan harga ganti rugi.

Tujuan penulisan hukum ini mengetahui tentang prosedur ganti kerugian pengadaan tanah Yogyakarta International Airport di Daerah Istimewa Yogyakarta dan dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara pada putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor 71/Pdt.G/2016/PN.Wat. Putusan tersebut berisi Tuan Suyanto menggugat Kepala Kanwil Badan Pertanahan nasional Daerah Istimewa Yogyakarta dan PT. Angkasa Pura I dikarenakan usaha tambak yang dimiliki Suyanto tidak mendapatkan ganti kerugian atas pembangunan Yogyakarta International Airport.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif, spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan wawancara, dan metode analisis data yang digunakan adalah kualitatif.

Hasil penelitian dari penulisan hukum ini ialah prosedur ganti kerugian pengadaan tanah Yogyakarta International Airport melalui beberapa langkah yaitu inventarisasi dan identifikasi, penilaian ganti kerugian, musyawarah ganti kerugian, dan pemberian ganti kerugian sesuai dengan apa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Hakim dalam memutus perkara putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor 71/Pdt.G/2016/PN.Wat telah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan sesuai apa yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan telah memenuhi asas keadilan dimana merupakan salah satu aspek utama dalam suatu putusan pengadilan.

Kata Kunci : *Pengadaan Tanah, Ganti Kerugian, Pertimbangan Hakim.*

ABSTRACT

Land acquisition in public purposes is an activity to acquire land by providing appropriate compensation to the party who releases land, buildings, plants and objects related to land. Land for public use is used for the construction of airports, ports, public roads, toll roads, railroads, terminals and public facilities. These activities often cause problems in the community, where land acquisition disputes for public interest are often caused by disagreements over compensation prices.

The legal writing discusses is about the procedure of land acquisition compensation for Yogyakarta International Airport in the Special Region of Yogyakarta and analysis of judge's considerations in Wates Court decision No. 71/Pdt.G/2016/PN.Wat. The decision contained Mr. Suyanto suing the Head of the National Land Agency Regional Office for the Special Region of Yogyakarta and PT. Angkasa Pura I, Mr. Suyanto as the pond owner did not receive compensation for the construction of Yogyakarta International Airport.

The approach method used in this writing is normative juridical, the research specifications used are analytical descriptive, the types of data used are primary data and secondary data, the data collection method used is library research and interviews, and the data analysis method used is qualitative.

The results of research from writing this law are procedures for compensation for land acquisition for Yogyakarta International Airport through several steps, namely inventory and identification, assessment of compensation, deliberations on compensation, and provision of compensation in accordance with what is regulated in Law Number 2 of 2012 about Land For Development For Public Interest. The judge in deciding the case for the decision of the Wates District Court Number 71/Pdt.G/2016/PN.Wat has paid attention to considerations according to what is regulated in the laws and regulations and has fulfilled the principle of justice which is one of the main aspects in a court decision.

Keywords : *Land Acquisition, Compensation, Judge's Considerations.*